



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
SORONG SELATAN TAHUN 2020**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, KETERANGAN BAWASLU, DAN
PENGESAHAN ALAT BUKTI
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 4 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020

PEMOHON

- Yance Salambauw dan Feliks Duwit (31/PHP.BUP-XIX/2021)
- Pieter Kondjol dan Madun Narwawan (36/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kabupaten Sorong Selatan

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti (II)

**4 Februari 2021, Pukul 08.12 – 09.52 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Erry Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yance Salambauw
2. Feliks Duwit

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021:

Christoffel Tutuarima

C. Termohon Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Nahum Krimadi
2. Ester Homer
3. Raymond Asmuruf
4. Paskalis Semunya
5. Norbertus
6. Michael Motte
7. Sally Sedubun

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021:

Daniel Tonapa Masiku

E. Pihak Terkait Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Samsudin Anggiluli
2. Alfons Sesa

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Harli Muin
2. Franditya Utomo
3. Putu Bravo Timothy

G. Pemohon Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Pieter Kondjol
2. Madun Narwawan

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yustian Dewi Widiastuti
2. Betsy Rachel Imkotta
3. Lutfi Rabudin

I. Bawaslu:

1. Ibnu Mas'ud (Ketua Bawaslu Prov. Papua Barat)
2. Yulius Yarollo (Kab. Sorong Selatan)
3. M. Nazil Hilmie (Kab. Sorong Selatan)
4. Yoas Saflembolo (Kab. Sorong Selatan)
5. Anita Desy Kemesrar (Kab. Sorong Selatan)

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.12 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirahim. Sidang Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pertama, saya sampaikan maaf, agak mundur sekitar 10 menit karena kita bertiga masih ... sebelumnya, 20 menit yang lalu, sampai melonjak 10 menit, kita mengadakan Rapat Hakim Internal di Panel untuk membahas beberapa hal yang berkembang kemarin, supaya bisa kita selesaikan.

Kemudian, yang kedua perlu saya sampaikan. Ya, masih berlaku protokol kesehatan, sehingga dalam persidangan ini, kita harus mempersingkat durasi persidangan, tapi tidak mengurangi arti adanya kepastian dan keadilan ... rasa keadilan, ya. Oleh karena itu, tolong disampaikan pokok-pokoknya saja karena kita harus mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, ya. Supaya bicara efisien, efektif, tapi tidak mengurangi kepastian hukum dan rasa keadilan. Karena yang dipentingkan dua-duanya tidak hanya apa yang disampaikan di dalam persidangan, tapi juga dokumen-dokumen tertulis yang sudah dibagikan dan semuanya sudah mendapat dokumen tertulis itu, baik mulai dari Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta seluruh bukti yang diajukan untuk mendukung semua dalil-dalil itu.

Baik, saya persilakan untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir dalam Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: CHRISTOFFEL TUTUARIMA

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: CHRISTOFFEL TUTUARIMA

Yang hadir pada pagi ini, Christoffel Tutuarima (Kuasa Hukum) dan dr. Feliks Duwit selaku Prinsipal Calon Wakil Bupati Sorong Selatan.

Dan yang mengikuti secara virtual, yaitu Yance Salambau, S.H., selaku Prinsipal Calon Bupati Sorong Selatan dan kawan-kawan. Terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pemohon Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Yang Mulia, untuk Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021 untuk yang hadir di persidangan di Mahkamah Konstitusi saya sendiri, Yustian Dewi Widiastuti dan Ibu Betsy. Kemudian yang hadir dalam persidangan melalui online, ada Bapak Pieter Kondjol sebagai Calon Bupati untuk Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021, dan Bapak Madun Narwawan, dan serta rekan kami Lutfi.

Mohon izin juga, Yang Mulia, mohon ... kami sampai sekarang belum mendapatkan Keterangan Pihak Terkait. Terima kasih.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Belum mendapat Keterangan Pihak Terkait? Oh. Pihak Terkait menyampaikan kepada kita, jumlahnya tidak sesuai PMK. Menurut PMK, itu seluruh yang hadir mestinya sudah dapat. Tapi ini karena jumlahnya kurang dari Pihak Terkait, maka baru dikopi, nanti sebentar lagi akan disampaikan, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Tadi disampaikan Pihak Terkait, berapa eksemplar itu, Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021? Pihak Terkait?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

4, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

4. Hakimnya 3, Paniteranya 1, di sini sudah 4. Kemudian Termohon, Bawaslu, dan Pemohon. Jadi, minimal itu 4, ditambah 1, 2, 3. 7 eksemplar, ya? Jadi, Anda kurang, sehingga menghambat jalannya revolusi. Harus dikopi di sini dulu, untung Mahkamah ada fotokopi. Kalau enggak, harus difotokopi di Sorong Selatan, kan akhirnya sidangnya seminggu lagi, ya? Nanti lain kali enggak boleh sesuai ... harus sesuai dengan PMK.

Baik, nanti, ya, Pemohon 36/PHP.BUP-XIX/2021? Sabar, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI

Ya, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini fotokopinya kayak mesin jet, kok, cepat di sini. Nanti segera dibagikan.

Termohon Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021, siapa yang hadir?

16. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Terima kasih, Yang Mulia. Termohon Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 sama juga dengan Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021. Hadir saya, Daniel Tonapa Masiku (Kuasa Hukum) didampingi Komisioner Bapak Nahum Krimadi. Kemudian secara daring, hadir Pimpinan KPU RI, lalu Ketua KPU Papua Barat, Bapak Paskalis Semunya. Komisioner, Pak Norbert. Sekretaris, Bapak Michael ... Bapak Michael Motte. Kemudian, hadir Ketua KPU Sorong Selatan, Ester Homer. Komisioner, Raymond Asmuruf. Dan Kasubbag Hukum, Sally Sedubun. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sama, ya, Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021?

18. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KPU Kabupaten Sorong Selatan, ya?

20. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Betul.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang Pihak Terkait Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021, sama? Yang Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021, siapa dulu?

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Izin, Yang Mulia. Saya hadir, Harli Muiin, Yang Mulia. Dan di online hadir Prinsipal ada 2 orang. Dan kemudian, 1 orang Kuasa Hukum yang hadir online, Franditya Utomo. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021, sama, ya?

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Sama, Yang Mulia, kami satu tim.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021, tadi jumlah yang diserahkan, berapa eksemplar?

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

4, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

4, sama itu berarti untuk Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021 belum dapat, ya, ini, Pemohon? Belum dapat Keterangan Pihak Terkait, ya? Oke. Menunggu, ya, sabar.

Sekarang Bawaslu. Ini Bawaslu mestinya hanya 1 Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, siapa yang hadir?

28. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir dalam Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021, Yulius Yarollo. Yang hadir secara online, Yoas Saflembolo (Divisi Pengawasan), Ibnu Mas'ud (Divisi Pengawasan, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat).

Yang hadir dalam Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021, Nazil Hilmie (Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat) dan Anita Kamesrar (Divisi SDM, Anggota Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan).

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

30. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Demikian, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Sambil menunggu berkas yang belum lengkap, ya, kita sudah bisa memulai. Sekarang Termohon Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021, saya persilakan untuk menyampaikan.

32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum saya mulai, mohon izin kami ada renvoi di jawaban Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021, halaman (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021?

34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Perkara nomor (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti dulu. Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 dulu saja. Kalau Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021 nanti. Ini sekarang Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 dulu.

36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Baik, baik.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda mengajukan Eksepsi?

38. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya. Eksepsi (...)

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Eksepsinya berkenaan dengan apa?

40. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Mengenai Kewenangan Mahkamah.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kewenangan?

42. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mahkamah tidak berwenang karena apa?

44. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Karena yang didalilkan Pemohon semuanya menyangkut sengketa proses.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, sengketa proses, bukan sengketa perselisihan hasil, gitu?

46. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Betul, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Yang kedua berkenaan dengan apa? Legal Standing?

48. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kalau nomor 3.1 itu hanya soal itu saja, Kewenangan.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kewenangan.

50. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kami lanjut pada Pokok Permohonan.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini di sini halaman (...)

52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Halaman 10, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eenggak, halaman 7 itu Anda nulis apa juga ... anu ... kan, Eksepsi, kan?

54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Oh, ya.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Pemohon tidak memenuhi syarat (...)

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, gimana itu?

58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Pasal 158, ya.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi, Anda mengatakan legal standing-nya juga enggak punya?

60. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya, betul, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena apa?

62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Karena selisih perolehan suaranya melebihi 2%.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Karena Pasal 158 menentukan hanya maksimal 2%.

64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

2%, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Saya bacanya saja teliti, kok. Itu yang di Eksepsi?

66. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang Pokok Permohonannya.

68. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Menyangkut Pokok Permohonan, ada 3 dalil yang disampaikan oleh Permohon. Yang pertama, Permohon mendalilkan Termohon tetap mengikutsertakan calon wakil bupati (...)

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

70. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Pasangan Petahana atas nama Calon Wakil Bupati, Drs. Alfons Sesa, M.M., tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

72. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kemudian, yang kedua, dalil mengenai pembagian data (...)

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang dijawab satu-satu dulu.

74. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Baik.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bagaimana dalil mengenai apakah betul pasangan calon yang nomor berapa ... Nomor 1?

76. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

78. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Pasangan Nomor Urut 1, calon wakil bupati (...)

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terutama atas nama Drs. Alfons?

80. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Alfons Sesa (...)

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dia masih berstatus sebagai PNS?

82. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Dari proses yang dilakukan oleh Termohon, Drs. Alfons Sesa sudah memenuhi syarat dan kami sebagai penyelenggara juga sudah melakukan klarifikasi kepada instansi dan pejabat yang berwenang. Kemudian, melakukan koordinasi secara berjenjang dengan KPU Provinsi Papua Barat dan KPU RI.

Bahwa berdasarkan petunjuk dari KPU RI yang disampaikan melalui KPU Provinsi Papua Barat, dinyatakan bahwa Drs. Alfons Sesa sudah memenuhi syarat.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Memenuhi syarat, kenapa? Sudah mengundurkan diri?

84. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Sudah mengundurkan diri, Yang Mulia. Jadi, pada tanggal ... pada saat mendaftar tanggal 5 September, Yang Mulia, yang bersangkutan sudah menanda ... menandatangani Formulir BB-3.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

86. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Menyatakan bersedia mengundurkan diri.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bersedia?

88. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Bersedia mengundurkan diri.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi sudah diproses?

90. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Lalu, pada tanggal 14 September, pada saat perbaikan persyaratan, yang bersangkutan sudah menyerahkan surat pengunduran diri yang dibuat pada bulan Maret, ditujukan pada instansi asal, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

92. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kemudian, oleh Badan Sumber Daya Manusia ... Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua, surat itu diteruskan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua pada tanggal 26 Juni 2020.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

94. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Lalu, BKD Provinsi Papua meneruskan rekomendasi tersebut kepada BKN sesuai surat tanggal 28 Juli 2020.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

96. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Dan kedua dokumen tersebut sudah diserahkan kepada KPU pada tanggal 14 September 2020.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

98. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Itu, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

100. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kemudian (...)

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada buktinya? Bukti berapa itu?

102. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ada bukti (...)

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti T berapa?

104. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Bukti ... Bukti T-12.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

106. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Bukti T-7 (...)

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

108. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Bukti T-13.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti T-7, Bukti T-12, dan Bukti T-13?

110. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Dan Bukti T-14.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tiga (...)

112. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Bukti T-14 itu tanggal ... surat tertanggal 3 November dari BKD Provinsi Papua mengenai Surat Keterangan Proses Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Alfons Sesa.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

114. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

T-14, Yang Mulia.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

116. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kemudian, pada tanggal 9 November, Drs. Alfons Sesa melalui tim suksesnya juga sudah menyerahkan pertimbangan teknis pemberhentian PNS oleh BKN.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Masalah pemberhentian atau masalah pengunduran diri sebagai PNS, berarti menurut Termohon sudah selesai?

118. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Sudah selesai.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oleh karena itu, tetap menjadi calon, ya?

120. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya, betul, Yang Mulia.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi ... silakan (...)

122. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kemudian (...)

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini sebentar, sebentar, masih ada apa yang mau diperdalam.

124. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar. Terima kasih, Pak Ketua.
Itu di keterangan Anda halaman 14, ya?

125. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

126. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Poin 4.3.6. Itu, yang Anda terima itu pertimbangan teknis, kan?

127. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Yang tanggal 9 November diserahkan itu pertimbangan teknis, tapi (...)

128. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pertimbangan teknis?

129. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

130. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lalu pertimbangan teknis itu yang ... yang Saudara anggap sebagai dasar pemberhentian?

131. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Yang kami jadikan pegangan itu, surat tanggal 3 November mengenai keterangan bahwa proses pemberhentian yang bersangkutan sedang dalam proses yang dikeluarkan oleh BKD Provinsi Papua. Itu diserahkan tanggal 8 November.

132. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini yang poin 4.34?

133. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Betul, Yang Mulia, T-14.

134. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Coba Anda lihat lagi yang diberikan ... apa ... apa namanya ... di peraturan itu, yang Anda kutip tadi. Mana yang menjadi dasar peraturan itu?

135. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kami mendasarkan pada PKPU Pasal 69. Di situ disebutkan bahwa surat keterangan pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang (...)

136. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi (...)

137. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon.

138. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, itu, kan ada tahapan-tahapannya.

139. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Betul, Yang Mulia.

140. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Coba Anda lihat, ya.

141. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

142. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Keputusan pemberhentian dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara. Poin A, ya?

143. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

144. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini kan yang Anda anggap tadi itu terjadi tanggal 9 November, ya?

145. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

146. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, ini di sini disebut, "Keputusan pemberhentian dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara," oke?

147. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya, betul.

148. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, apakah pertimbangan teknis itu karena yang 9 November Anda terima itu, kan pertimbangan teknis, kan?

149. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

150. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apakah pertimbangan teknis itu yang Anda anggap sebagai keputusan pemberhentian?

151. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kalau keputusan KPU itu didasarkan pada poin D, Yang Mulia.

152. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

153. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Itu juga berdasarkan petunjuk dari KPU RI.

154. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini kan begini, "Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, anggota TNI, POLRI, PNS, atau gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati," dan seterusnya, "Yang mencalonkan diri di daerah lain serta menjabat pegawai BUMN, serta kepala daerah, para perangkat desa adalah sebagai berikut. Keputusan pemberhentian dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara."

Kalau yang D-nya ini, ya. "Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses yang berwenang dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon." Itu sudah diserahkan?

155. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya, sudah.

156. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, bagaimana Anda menjelaskan poin A ini? Keputusan pemberhentian itu? Di mana (...)

157. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kalau (...)

158. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di mana peristiwa itu terjadi dalam proses pencalonan ini?

159. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kalau yang kami pahami, itu juga berdasarkan koordinasi kami dengan KPU provinsi dan KPU RI. Pemberlakuan peraturan ini dilakukan secara berjenjang, artinya pilihannya bisa poin A, bisa juga poin yang lain.

160. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, begitu, ya?

161. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Demikian, Yang Mulia.

162. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada KPU RI, enggak? Bisa enggak dicek, ya, Pak Ketua?

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

164. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

KPU RI ada, enggak?

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Siapa KPU RI yang hadir? Pak Hasyim atau siapa? Coba, siapa yang hadir dari KPU RI? Petugas, tolong diarahkan ke KPU! Ini KPU RI atau KPU Papua ini yang hadir ini?

166. PETUGAS VICON:

Belum ... belum hadir, Pak.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KPU RI belum hadir? Yang ada KPU provinsi?

168. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: PASKALIS SEMUNYA

Ya, Yang Mulia.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ini terhadap ... anu ... tadi Anda sudah mengikuti, kan? Bagaimana ... pertanyaannya, itu bagaimana rumusan dikatakan mengundurkan diri, sehingga sah ... sah pencalonannya menurut KPU? Silakan!

170. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021: PASKALIS SEMUNYA

Yang Mulia. Dalam pelaporan ASN yang akan mendaftar menjadi calon. Bahwa dalam (suara tidak terdengar jelas) bersedia mengundurkan diri sesuai juknis itu 5 hari setelah ditetapkan, di melakukan atau dia membuktikan dokumen, yaitu pernyataan pengunduran diri, surat yang bersangkutan kepada instansi bahwa sudah mengundurkan diri dibuktikan dengan tanda terima dan keterangan dari instansi yang berwenang, pengunduran diri sedang diproses.

Nah, 4 dokumen ini yang (suara tidak terdengar jelas) diatur untuk ... bagi mereka yang akan mengundurkan diri tadi. Khusus untuk Sorong Selatan, Pak Alfons Sesa, setelah KPU provinsi mendalami dokumen yang diserahkan. Bahwasanya dokumen yang diterima sesuai laporan KPU provinsi kepada KPU RI (suara tidak terdengar jelas) pernyataan (suara tidak terdengar jelas) pengunduran diri, namun diikutkan dengan pembuktian klarifikasi untuk mendapatkan keabsahan bahwa dengan (suara tidak terdengar jelas) itu, apakah layak dikenakan sanksi 69 ayat (5)? Untuk diteruskan ke KPU provinsi, sebagai

pertimbangan kepada KPU untuk mendapat jawaban bahwa dari penelitian dokumen pernyataan maupun surat kepada (suara tidak terdengar jelas) Papua dan keterangan-keterangan dari (suara tidak terdengar jelas) tersebut membuktikan bahwa secara batas waktu (suara tidak terdengar jelas) 69 (suara tidak terdengar jelas) SK pemberhentian itu kemudian diterima oleh KPU Sorong Selatan, tetapi prosedur (suara tidak terdengar jelas) dengan melampirkan dokumen-dokumen calon (suara tidak terdengar jelas) sedang berjalan, sehingga pada saat kami mau melakukan hal tersebut (suara tidak terdengar jelas) tidak dapat dikenakan kepada Alfons Sesa karena ada keterangan dari (suara tidak terdengar jelas) 8 November itu yang menyatakan bahwa pengunduran diri Pak Alfons Sesa sedang diproses. Dengan demikian (...)

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, cukup, Pak. Saya kira, cukup, terima kasih, penjelasannya. Nanti akan kita cek. Prof. Saldi, masih ada? Cukup, ya?

Saya minta penegasan KPU, Kuasa Hukum yang di sini. Sebetulnya dalam rangka pencalonan, yang namanya mengundurkan diri itu yang menurut undang-undang yang mengatur mengenai pilkada, pencalonan itu sampai di mana sih? Harus ada surat pengunduran dirinya, atau surat pernyataan mengundurkan diri, atau ada proses? Di mana?

172. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Yang Mulia, mungkin mengenai penafsiran itu sebenarnya yang lebih berwenang itu adalah KPU RI. Tetapi pemahaman kami berdasarkan juga koordinasi yang dilakukan (...)

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak. Tapi kan Anda sudah mempelajari.

174. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan itu dilaksanakan?

176. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan? Ya ... yang mana ini? Apakah sudah ... harus sudah ada surat keputusan tentang berhenti ... pemberhentiannya, ataukah hanya mengatakan me ... mengundurkan diri, atau sudah dalam proses? Apa yang dimaksud oleh peraturan mengenai pilkada? Pasal berapa sih yang digunakan? Tolong, bisa dijelaskan?

178. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya, yang digunakan itu adalah PKPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal (...)

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT

PKPU nomor berapa?

180. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

PKPU Nomor 3 Tahun 2017, Yang Mulia.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT

2017.

182. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pasal?

184. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Pasal 69.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pasal 69?

186. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang tentang Pilkada pasal berapa? Tentunya KPU, kan enggak bisa. PKPU enggak bisa, bertentangan dengan undang-undangnya tho?

188. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus pasal berapa?

190. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Pasal ... dari Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 (...)

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

192. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Pasal 40 kalau tidak salah, Yang Mulia.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nomor berapa?

194. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pasal 40.

196. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Tentang pencalonan.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mungkin KPU-nya tahu, enggak? Anda menjalankan ini, itu diturunkan dari mana? Silakan!

198. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

200. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Dapat kami menjelaskan berkait dengan ... berkaitan dengan proses pencalonan, tentu itu penjabaran dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 40 tentang pencalonan (...)

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pasal 40, ya?

202. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Pasal 40.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, cukup.

204. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Ya.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, kemudian dijabarkan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017?

206. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Ya.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pasalnya Pasal 69?

208. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Pasal 69.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Nanti kita cek, gitu. Ini bukti Anda T-7 sampai dengan T-14? Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14?

210. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Berkaitan dengan itu juga, Yang Mulia. Ada Bukti T-30, surat dari KPU RI.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti T-30?

212. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Bukti T-30 dan Surat dari KPU Provinsi Papua Barat, Bukti T-31.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti T-31?

214. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Betul, Yang Mulia.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Silakan, Yang Mulia!

216. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini dari KPU tadi, ya? Pasal 40, ya? Ini coba diteliti dulu, Pasal 40 itu mengenai soal partai politik ... gabungan partai politik.

217. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Itu ... izin (...)

218. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini yang jelas di Pasal 7 huruf s itu yang mengatur ini, "Mengundurkan diri sebagai anggota TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon."

Nah, jadi tadi itu diterjemahkan atau peraturan pelaksanaannya di Pasal 69 ayat (1) dan Pasal (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2017.

Nah, itu pertanyaannya tadi, di mana? Apakah sejak dia menyatakan mengundurkan diri itu sudah dianggap menerjemahkan Pasal 6 huruf ... saya ulangi, Pasal 7 huruf s ini? Itu yang dipertanyakan tadi.

219. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya, Yang Mulia. Sekali lagi, tentu sebagai pelaksana di lapangan, kami tidak berwenang untuk menafsirkan itu, tetapi sebagai langkah ... apa namanya ... kehati-hatian, kami meminta petunjuk secara berjenjang kepada KPU provinsi, kepada KPU RI. Dan petunjuk KPU RI seperti yang tadi kami sampaikan bahwa yang bersangkutan karena sudah bisa membuktikan proses pemberhentiannya sedang dalam proses, maka dia dianggap memenuhi syarat.

220. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah dianggap, sudah klir?

221. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya, sudah memenuhi ... ya, sudah klir. Karena ya, kita juga memahami. Pertama, kondisi birokrasi yang berjalan tidak normal. Jadi, bayangkan (...)

222. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jangan begitu statement-nya!

223. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya. Kalau kami lihat dari prosesnya, Yang Mulia.

224. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bahwa ... apa ... di dalam birokrasi memang ada proses-proses yang berjenjang. Bukan tidak normal, kalau tidak normal (...)

225. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Karena kondisi ... kondisi pandemi, Yang Mulia.

226. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gimana?

227. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kondisi pandemi. Jadi, surat dari BKD Papua itu sudah dikirim per 28 Juli.

228. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Anda mengaitkan dengan ada itu?

229. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya. Ke BKN, baru keluar pertek tanggal 3 November.

230. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ya sudah. Kita sudah cukup itu.

231. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sedikit, Yang Mulia.

232. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

233. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu di Pasal 69 ayat (1) dan ayat (5) PKPU itu, ini KPU coba, coba apa isinya? Ini saya melihat di situ disebutkan bahwa mengundurkan diri itu adalah ditanda ... diperlukan SK pejabat yang sudah dimasukkan 30 hari sebelum pemungutan suara. Ini apa SK pejabat inilah yang maksudnya yang bagaimana ini SK pejabat ini? Tolong di PKPU, apa disebutkan?

234. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Baik, izin, Yang Mulia. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan. Berdasarkan jadwal pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal, berkaitan dengan pendaftaran pasangan calon ... berkaitan dengan pendaftaran pasangan calon. Dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan, di situ ada pemenuhan dokumen yang bersifat syarat pencalonan dan syarat calon.

Pertama, syarat pencalonan adalah syarat yang wajib dipenuhi oleh pasangan calon saat mendaftarkan diri ke KPU. Dan yang kedua adalah syarat calon, itu adalah syarat calon adalah dokumen yang pada saat pendaftaran, misalnya dokumen sebagaimana dimaksud belum sempat dipenuhi, maka ada ruang untuk peserta pemilihan dapat mengurus atau pun melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud.

Tentu yang akan menjadi pegangan KPU berkaitan dengan syarat calon itu ada tiga dokumen, yaitu Formulir Model BB1-KWK atau surat pernyataan ... surat pernyataan pencalonan sebagai pasangan calon bupati ataupun wakil bupati. Di situ ada poin ... misalnya yang berkaitan dengan TNI/Polri, di situ wajib ... apa ... dalam klausulnya, "Bersedia mengundurkan diri dari jabatan sebagai TNI/Polri atau ASN." Itu Formulir Model BB1-KWK. Kemudian ... itu ditandatangani di atas materai 6.000.

Yang kedua adalah Formulir Model BB2-KWK. Itu adalah daftar riwayat hidup, dimana di situ tertera pekerjaan yang bersangkutan.

Dan yang terakhir adalah Formulir Model BB3-KWK atau bersedia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ... di instansi BUMN atau pun BUMD. Dalam artian bahwa KPU menerima dokumen tersebut, ditandatangani di atas materi 6.000. Dan kami berpegang pada tiga dokumen ini bahwa yang bersangkutan akan melengkapi atau pun mengurus dokumen sebagaimana yang belum lengkap.

235. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi sebelum ... apa namanya ... sebelum pemungutan itu, hanya pernyataan daripada calon?

236. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Pernyataan, ya.

237. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dengan catatan (...)

238. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Setelah (...)

239. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Selesai pemilihan nanti boleh dilengkapi. Itu terjemahan dari PKPU itu, ya?

240. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Izin, Yang Mulia. Jadi di situ ada waktu berdasarkan peraturan KPU Nomor 5 tentang Tahapan Program dan Jadwal itu terhitung sejak tanggal 28 Agustus sampai 3 November itu pengumuman kepada publik yang akan mendaftarkan diri. Kemudian pada tanggal 4 sampai 6 November itu adalah pendaftaran ke KPU.

241. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, itu sudah, sudah mengerti. Yang penting (...)

242. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Jadi dokumen ... izin, Yang Mulia. Dokumen tersebut itu akan disampaikan pada saat perbaikan dokumen yang dilakukan verifikasi oleh KPU. Nanti KPU akan menemukan bahwa berkaitan dokumen sebagaimana dimaksud pasangan calon ini tidak lengkap, sehingga wajib untuk nanti akan (...)

243. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Melengkapi?

244. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Melengkapinya.

245. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Setelah pemilihan?

246. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Setelah pendaftaran.

247. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup, Yang Mulia.

248. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ya. Nanti akan kita nilai, kita akan cek kembali, ya. Nanti akan saya cross-check dengan Bawaslu mengenai masalah pencalonan ini ada masalah atau tidak. Bawaslu siap untuk menjawab, ya.

Ya, kemudian yang berikutnya masalah pencalonan kita anggap sudah dijawab, direspon, nanti untuk menjadikan catatan kita.

Kemudian yang berikutnya mengenai anu ... Saudara Alex Duwit, siapa?

249. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Saudara Alex Duwit ini plt sekretaris dewan, Yang Mulia.

250. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Plt sekretaris dewan?

251. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya, plt sekretaris dewan.

252. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dia di ... anu ... itu (...)

253. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Dia di (...)

254. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Diganti itu?

255. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

256. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ada ... ada di dalam dalil Pemohon dikatakan ada dilakukan oleh petahana pergantian jabatan-jabatan di ASN di lingkungan (...)

257. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Cuman satu (...)

258. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kabupaten itu?

259. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Cuman satu di (...)

260. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cuman satu itu?

261. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

262. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekretaris dewan?

263. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Plt, plt.

264. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Plt dewan?

265. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Plt sekretaris dewan (...)

266. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Giamana jabawan, responnya bagaimana?

267. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Yang Mulia, jadi mengenai Alex Duwit ini, sudah ada surat pengusulan pergantian dari Pimpinan DPRD Kabupaten Sorong Selatan sejak bulan Januari 2020.

268. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

269. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Tetapi karena bupati juga hati-hati, waktu itukan ada penundaan-penundaan tahapan pilkada kalau tidak salah (...)

270. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

271. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ada bulan Juni. Jadi, bupati hati-hati untuk merespon itu karena berkaitan dengan Pasal 71.

272. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

273. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kemudian dari dewan terus mendesak, mendesak untuk dilakukan pergantian dengan berbagai alasan dan pada akhirnya terjadi pemalangan kantor DPRD oleh pimpinan dan anggota DPRD karena bupati tidak merespon surat itu.

Kemudian bupati atas pertimbangan kinerja DPRD dan hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD, lalu merespon surat itu dengan menyetujui pemberhentian itu, menyetujui pemberhentian yang

diusukan. Karena berdasarkan aturan, sekretaris dewann ini berada dan bertanggung jawab kepada pimpinan dari DPRD. Bupati hanya menyetujui pemberhentian dan pengangkatan DPRD.

274. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. itu di halaman 24 dan seterusnya, ya?

275. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya, betul, Yang Mulia.

276. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus apa lagi dalilnya?

277. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Karena ada keberatan dan juga ada surat dari Bawaslu, maka seperti soal pencalonan tadi KPU juga melakukan koordinasi dengan KPU Papua Barat. Petunjuk dari KPU Papua Barat bahwa KPU Sorong Selatan diminta membentuk tim klarifikasi, kemudian KPU Sorong Selatan (...)

278. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini masalah balik ke masalah pencalonan?

279. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Bukan, masalah Alex Duwit.

280. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Alex Duwit.

281. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ada dua petunjuk klarifikasi dari KPU Papua Barat dan KPU ini menyangkut syarat calon tadi dan pemberhentian Alex Duwit.

282. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

283. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

284. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

285. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kemudian dibentuk tim klarifikasi yang dipimpin Ketua KPU Sorong Selatan dan KPU Sorong Selatan kemudian meminta klarifikasi kepada Bupati Sorong Selatan.

286. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

287. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Nah, penyampaian dari Bupati Sorong Selatan antara lain bahwa yang bersangkutan, pertama, tidak memiliki keinginan untuk mengganti, tapi dengan alasan tadi ada desakan dari dewan, kemudian bahkan ada pemalangan kantor DPRD. Nah, oleh karena itu bupati merasa bahwa ini menjadi persoalan serius, sehingga bupati merespon surat dari pimpinan DPRD yang alasannya itu mungkin saya bisa bacakan di halaman 27.

288. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

289. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Di poin 69. Disebutkan bahwa usulan penggantian itu dilaksanakan atas alasan. A. Pola pengelolaan keuangan DPRD yang dilakukan saudara Plt Sekretaris DPRD in casu Alexander Duwit dilakukan secara tertutup dalam arti spekulatif, manipulatif, tidak adanya transparansi terhadap hal-hal keuangan normatif dewan, baik berupa tunjangan-tunjangan, gaji, serta, dana kegiatan yang terkesan diputabalikan dan menyalahi ketentuan yang berlaku dan seterusnya, mungkin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

290. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

291. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Jadi, inilah salah satu pertimbangan yang menjadi dasar menurut penyampaian bupati pada saat diklarifikasi seperti itu, Yang Mulia.

292. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. tapi itu izin dari ... di laporkan ke Kementerian Dalam Negeri, enggak? Tanpa (...)

293. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Pada saat diklarifikasi tidak ada ini karena menurut surat edaran BKN.

294. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

295. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Plt sekretaris dewan itu bukan pejabat ... bukan pejabat. Jadi, karena bukan pejabat, maka menurut ... ini juga hasil klarifikasi kepada BKN regional di Manokwari oleh KPU.

296. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi tidak perlu mendapat surat persetujuan?

297. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Tidak perlu. Ya karena dia bukan kategori pejabat.

298. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

299. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Itu yang ... jadi, klarifikasi itu sampai ke BKN regional di Manokwari oleh (...)

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena statusnya bukan pejabat definitif (...)

301. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Bukan pejabat.

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi plt?

303. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya, dia plt dan sudah menjabat hampir 3 tahun.

304. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di dalam (...)

305. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Di DPRD.

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kedudukannya sebagai plt?

307. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya, bertul, Yang Mulia. Yang menurut aturan seharusnya 3 bulan dan bisa diperpanjang lagi 3 bulan.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

309. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Mungkin itu yang terkait dengan Alex Duwit, Yang Mulia.

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, yang lain ... dalil yang lain, yang direspons apa?

311. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kalau di ... menyangkut Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 hanya 2 itu.

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hanya itu yang penting, ya?

313. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kalau menyangkut dana prospek karena ini tidak ada juga penyampaian dari Bawaslu kepada KPU, tidak ada juga aduan kepada KPU. Jadi kami tidak kompeten untuk menanggapi, Yang Mulia.

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Petitumnya sekarang.

315. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang sudah diuraikan di atas, Termohon memohon kepada, Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, agar berkenaan memutuskan amarnya, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Sorong Selatan Nomor 92 dan seterusnya dianggap dibacakan.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 yang benar sebagaimana tabel, dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum.

316. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik terima kasih. Prof. Saldi, ada? Cukup ya. Yang Mulia, ada? Cukup ya.

Baik, kita lanjutkan sekarang keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021.

317. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Yang Mulia?

318. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gimana, apa lagi?

319. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Tadi yang kami mau renvoi itu di halaman 26 Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021.

320. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti. Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021 kan belum dibahas. Ya, jangan anu ... jangan kesusu. Honorinya juga masih lama, jangan tergesa-gesa.

Baik, sekarang Pihak Terkait Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021, sekarang sudah diperoleh semuanya, ya, Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021? Sudah dapat, ya? Silakan, pokok-pokoknya saja.

321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualakum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya. Pertama, perkenalkan saya untuk membacakan ini.

322. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jangan dibacakan.

323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya. Pertama kewenangan (...)

324. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda mengajukan eksepsi?

325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Kewenangan Mahkamah.

326. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Dalam Petitum Pemohon angka 2 meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 56/PL.02 Pasangan Calon Nomor Urut 1. Padahal kewenangan tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 itu adalah ranah Bawaslu kabupaten, atau ranah provinsi, atau pengadilan tinggi tata usaha negara.

328. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan kewenangan. Terus kedudukan?

329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, dia dalam ... dalam Petitum pada angka 4, Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan keputusan penetapan hasil oleh Termohon, sedangkan dalam uraian Termohon[Sic!] mulai dari dalil 31, 32, 33, Pemohon sama sekali tidak menguraikan kualifikasi kerugian Pemohon (...)

330. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan seluruhnya itu.

331. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, siap, Yang Mulia.

332. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mengenai Eksepsi, kewenangan dianggap telah dibacakan.

333. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Siap, Yang Mulia.

334. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus Kedudukan Hukum ada Eksepsi?

335. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Kedudukan Hukum, saya kira Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum terhadap perkara ini. Pertama, ya, kalau kita lihat dari Penduduk Sorong Selatan.

336. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap telah dibacakan.

337. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ada 54.000 (...)

338. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Intinya saja, tidak memenuhi Pasal 158, gitu kan?

339. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Tidak memenuhi Pasal 158.

340. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus sekarang?

341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Kemudian menurut Pemohon ... Pihak Terkait bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas.

342. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kenapa tidak jelas? Intinya!

343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Pertama, ya, dalam Petition Pemohon angka 4 tadi meminta perhitungan suara yang benar, padahal mereka tidak mempersoalkan perhitungan suara di TPS.

344. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Itu, Yang Mulia.

346. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu kan penjelasan di halaman 4 kan?

347. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia.

348. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang di dalam Pokok Permohonan?

349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Dalam Pokok Permohonan. Pada pokoknya mempersoalkan 3 hal. Pertama pada angka 31, angka 32, dan 33, yaitu persyaratan pencalonan calon wakil dari Pihak Terkait dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan.

Kedua. Dugaan mengenai tuduhan dari Pemohon mengenai penyalahgunaan pros ... Program Prospek Kabupaten Sorong Selatan.

350. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anggaran yang disampaikan kepada kampung-kampung itu?

351. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia.

Yang ketiga adalah pemberhentian dan penunjukan ... bukan pemberhentian, Yang Mulia, saya renvoi pemberhentian dan penunjukan plt, Yang Mulia.

352. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya.

354. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu, 3-3 nya?

355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, itu yang menjadi alasan Pemohon untuk mendalilkan.

356. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus sekarang coba dijelaskan, apakah sudah memenuhi syarat belum Pihak Terkait itu?

357. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Bagi kami memenuhi syarat, Yang Mulia.

358. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa?

359. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Pertama.

360. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah mengajukan surat pengunduran diri?

361. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Sudah, Yang Mulia. Kami bacakan secara detail dari awal, Yang Mulia, izin?

362. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak usah.

363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Pada tanggal 5 September 2020, kami telah mendaftar sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan kepada Komisi Pemilihan Umum. Kemudian dari berkas itu, kami mengisi berkas TT-1 memang ada kekurangan dokumen. Kemudian tahap ... terhadap dokumen tersebut, TT-1, yang kurang, kami itu mendapat pemberitahuan dari KPU bahwa ada kekurangan dokumen. Lalu kemudian pada tanggal 14 Maret, itu kami melengkapi semua dokumen yang diminta oleh ini ... KPU.

364. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang yang inti itu dijelaskan. Apakah betul Anda sudah memenuhi syarat? Artinya apakah betul yang didalilkan itu sudah mengundurkan diri apa belum?

365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Sudah mengundurkan diri, Yang Mulia.

366. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mendungurkan diri?

367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya.

368. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Buktinya apa di situ?

369. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Buktinya, kami punya SK yang pengunduran diri dari pre ... ditandatangani oleh presiden ada di bukti (...)

370. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha? Sudah ada surat pengunduran diri?

371. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Sudah, Yang Mulia, surat berhenti, Yang Mulia, diberhentikan, bukan pengunduran, surat diberhentikan.

372. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Diberhentikan presiden?

373. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Sebagai PNS dari presiden.

374. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti P berap ... itu Bukti PT berapa itu?

375. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Itu ada di Bukti P-20, Yang Mulia ... Bukti PT-20, Yang Mulia.

376. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti PT-20?

377. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya.

378. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu mulai tertanggal berapa sudah diberhentikan?

379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Di ... dia (...)

380. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Coba, Panitera Pengganti (...)

381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Sejak 1 Desember[Sic!] di sini, Yang Mulia.

382. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

1 November, Yang Mulia.

384. KETUA: ARIEF HIDAYAT

1 November?

385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya.

386. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti PT-20?

387. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya. Bukti PT-20. Itu juga ada surat keterangan yang Bukti PT-21 dari Badan Kepegawaian Nasional.

388. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti PT-21?

389. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya.

390. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

391. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Kemudian, ada lagi bahwa Termohon[Sic!] memang benar-benar sudah mengundurkan diri itu sudah di ... apa ... disampaikan ke ... ini ... Bukti PT-22. Kemudian ... nah, berdasarkan keputusan presiden tersebut yang bersangkutan sudah juga menerbitkan surat keterangan bahwa menerangkan terhitung tanggal 15 November 2020, Drs. Alfons Sesa diberhentikan (...)

392. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu (...)

393. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Dengan hormat, Yang Mulia.

394. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Begini. Itu, kan, SK ... SK itu dilakukan ... apa ... terbitnya baru setelah dilakukan pemungutan suara. Tapi pada waktu dia mendaftar pada waktu pencalonan, itu apa buktinya kalau dia sudah menyatakan? Menurut Termohon dia sudah berproses untuk mengundurkan diri, kan, gitu? Ya, kan?

395. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya. Saya kira kami sampaikan bukti-bukti tanggal 9 November, Yang Mulia. Saya kira ada bukti (...)

396. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau 9 November itu, kan, sudah (...)

397. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Satu bulan sebelum (...)

398. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pencalonan, kan?

399. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Pemungutan suara, Yang Mulia.

400. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Itu, kan sudah mulai. Pencalonan sudah selesai. Ini maksudnya Anda tadi sendiri mengatakan bahwa proses pencalonan itu dibutuhkan syarat bukan pegawai negeri sipil. Dia makanya harus mengundurkan diri.

401. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya.

402. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan?

403. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Dia sudah mengundurkan diri, Yang Mulia. Kami menyampaikan itu kepada Termohon itu tanggal 9 November, Yang Mulia.

404. KETUA: ARIEF HIDAYAT

9 November.

405. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia.

406. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi proses sebelumnya ... sekarang saya tanya. Kapan ditetapkan sebagai pasangan calon, Termohon?

407. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Tanggal (...)

408. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, ini Termohon saya tanya. Anda, kan bukan yang menetapkan.

409. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Tanggal 23 September, Yang Mulia.

410. KETUA: ARIEF HIDAYAT

23 September. Sekarang pertanyaannya itu ke sana. Pada waktu tanggal 23 September, apakah sudah ada pengunduran dirinya? Belum, kan?

411. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Tanggal 23 September, Yang Mulia ... mohon izin, Yang Mulia, itu surat pernyataan mengundurkan diri yang diisi BB-3 (...)

412. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke ... nah, gitu (...)

413. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Jadi (...)

414. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hanya itu harus jelas.

415. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, itu di ... syarat ketentuan dalam undang-undang (...)

416. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Begini, Saya ngomong dulu, jangan dijawab. Yang Anda sampaikan di Bukti P[Sic!]-20, Bukti P[Sic!]-21 itu ... itu di dalam proses pencalonan sudah menyatakan pengunduran diri, tapi karena birokrasi maka prosesnya baru ... Bukti PT-20, Bukti PT-21 munculnya sudah di bulan November, kan? Ya, kan? Lah, ya. Jadi, ini berproses. Jadi, kalau ditanya, apakah waktu pencalonan ... tahap pencalonan sudah mengundurkan diri ... sudah ada SK-nya? Nah, belum. Gitu, lho. Tapi itu sudah berproses, makanya aturan PKPU-nya ... aturan pilkadanya bagaimana? Tadi yang ditanyakan Termohon, begitu.

Ya, baik. Nanti kita yang menilai, saya kira enggak perlu diperpanjang lagi, ya, Prof? Ya, Yang Mulia? Sudah cukup ini nanti kita menjadi gambaran (...)

417. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Izin, Yang Mulia.

418. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, apa?

419. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Yang ... nah, ini kami sesungguhnya sebelum ini juga konsultasi dengan KPU.

420. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu sudah (...)

421. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

He eh, KPU RI.

422. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah diketahui, ya. Sudah, kita sudah tahu gambaran yang tadi sampaikan di situ. Ya. Bahwa itu ada proses berlanjut yang kemudian Anda sudah melengkapi tapi itu munculnya di bulan sat ... 1 November, kan, tadi dikatakan, tho? Ya? Bukti PT-20.

423. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia.

424. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan? Terus kemudian Bukti PT-21 apa itu?

425. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Bukti PT-21 itu telah ... surat dari Badan Kepegawaian Nasional (...)

426. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, yang Bukti PT-20 ... SK presiden itu kalau sudah diberhentikan, Bukti PT-21-nya ... BKN?

427. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia.

428. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ya. Sudah itu nanti menjadi bahan penilaian kita, apakah itu sesuai proses itu ... makanya tadi, kan ditanyakan kepada KPU. Apakah mulai dari mengundur ... pernyataan mengundurkan diri itu sudah bisa dipakai syarat, gitu. Karena proses pengu ... mengundurnya ASN harus melalui proses birokrasi. Ditambah lagi oleh Termohon bahwa ini di dalam keadaan tidak normal karena ada pandemi, maka bisa saja putusan birokrasi itu agak lambat, kan, gitu, kan?

429. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya.

430. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu. Kita sudah memahami.

431. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Mohon izin, Yang Mulia. Bisa saya tambahkan sedikit?

432. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa ... ada tambahan apa lagi?

433. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, ini berkaitan dengan pengajuan ini memang ada kondisi ini pada saat kami mengajukan tanggal 3 ini ... apa ... pada awal menyampaikan ini ke Pemerintah Papua karena Beliau ini adalah

bertugas di pap ... Provinsi Papua, itu pada waktu itu lambat karena pada saat bersamaan (...)

434. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya (...)

435. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Itu kena Covid, Yang Mulia.

436. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik (...)

437. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Dia diterbangkan ke Jakarta, sehingga itu terlambat.

438. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah, enggak usah diterangkan. Kita sudah memahami itu, tinggal nanti kita menilai, gitu, ya. Apakah yang betul itu dalil Pemohon, apakah apa yang sudah dilakukan oleh Termohon, gitu. Sekarang Saudara, apa lagi? Yang kedua berkenaan dengan itu ... dalil yang mengatakan ada mutasi pejabat, padahal ada ketentuan tidak boleh melakukan mutasi pejabat, itu. Gimana?

439. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Mungkin yang pertama, Yang Mulia, dana prospek.

440. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Mau dijawab dana prospek dulu?

441. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, ini yang didalilkan oleh Pemohon terhadap ... ini kemarin sudah di renvoi 31.2 poin ... poin 21 sampai dengan 29 (...)

442. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, itu substansinya saja, pokoknya dana prospek, gimana?

443. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, sebelumnya dana prospek ini adalah dana otsus dari Pemerintah Papua, ini program yang memang ... yang ... apa ... untuk seluruh Pemerintah Papua Barat, tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang ada di kampung, mengurangi kemiskinan kekurangan pangan karena salah satu memang kondisinya adalah kondisi covid.

Nah kemudian, berdasarkan, ya, PKPU Nomor 5 pelaksanaan tahapan kampanye terhitung dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020. Nah, dari tanggal 26 September 2020, Pihak Terkait karena cuti digantikan oleh Martinus Salamuk yang menjabat sebagai plt, Yang Mulia, sementara pencairan dana program strategis peningkatan pembangunan kampung prospek terhitung dari tanggal 6 November 2020.

Dengan demikian, bukan merupakan tanggung jawab hukum Pihak Terkait, sebab disamping tidak berwenang mencampuri urusan menjadi wewenang plt dan juga merupakan perbuatan terlarang dalam tahapan kampanye untuk dilakukan.

444. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Intinya (...)

445. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Bahwa selain itu (...)

446. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Intinya begini (...)

447. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Tertundannya pembagian dana prospek (...)

448. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar.

449. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia.

450. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Intinya supaya menyingkat waktu. Bahwa dana prospek itu dilakukan karena itu program pemerintah provinsi?

451. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia.

452. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi pemerintah kabupaten tinggal melaksanakan?

453. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia.

454. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan yang melaksanakan bukan bupati incumbent, begitu, kan?

455. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia.

456. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya itu, kayak begitu saja cukup.

457. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Saya perlu tambah ... izin, Yang Mulia. Saya perlu tambahkan lagi, bahwa keterlambatan dana ini di ... apa ... oleh Pemohon. Itu karena begitu masuk ke dap ... pemerintah daerah ini kan pada saat yang sama ... apa ... APBD sudah selesai dibahas. Oleh karena itu ... apa ... untuk

membagi proyek ... distribusi proyek ini, pemerintah daerah juga membutuhkan akuntabilitas dia (...)

458. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

459. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Terhadap negara karena uang negara, akuntabilitas dia terhadap masyarakat (...)

460. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu sudah. Berarti sudah (...)

461. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Oleh karena itu, dalam (...)

462. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar! Halah! Dengarkan dahulu.
Berarti kalau begitu, ini sudah diprogram dalam APBD?

463. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia.

464. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau program APBD, itu berarti bukan keinginan bupati semata, tapi memperoleh persetujuan dari DPRD, gitu, kan?

465. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

APBD-nya tidak selesai dibahas, Yang Mulia.

466. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, ya.

467. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Dengan demikian, dibuat peraturan ... perubahan peraturan (...)

468. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul, tapi kan itu berarti programnya, bukan keinginan bupati semata, tapi merupakan persetujuan juga dengan DPRD?

469. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Benar, Yang Mulia.

470. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, ya, sudah. Terus apalagi?

471. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, terhadap argumentasi yang disebut merugikan mengenai menyalahgunakan program strategis sama sekali tidak benar.

472. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

473. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, mereka ... Pemohon menyebutkan bahwa itu didistribusi lambat, padahal dana itu sudah masuk ke rekening ... apa ... para penerima itu tanggal 4, sebenarnya tinggal pencairannya. Jadi, pencairannya itu adalah kampung-kampung, bukan ini (...)

474. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

475. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya.

476. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

477. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Jadi, kepala kampung sendiri karena waktu itu bank di Papua, karena tanggal 5 itu jatuh pada hari Sabtu, Yang Mulia.

478. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu ada buktinya? Bukti berapa?

479. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Bukti itu, ada bukti PT-29, PT-30.

480. KETUA: ARIEF HIDAYAT

29, 30?

481. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, 30. Kemudian ada bukti PT-31.

482. KETUA: ARIEF HIDAYAT

31?

483. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia.
Ada ... ya, ada bukti ... nah, ini juga sudah diproses oleh Bawaslu (...)

484. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Nanti Bawaslu yang menyampaikan.

485. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Siap, Yang Mulia.

486. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jangan mengajari Bawaslu. Terus sekarang yang mengenai mutasi pejabat, gimana?

487. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, ini yang dipermasalahkan adalah Keputusan Bupati Nomor 800/256 tanggal 3 September 2020 tentang Pemberhentian Pejabat. Nah, saya kira pemberhentian pejabat ini tidak diatur dalam Pasal 71, yang diatur adalah rotasi, Yang Mulia.

Nah, yang di sini adalah bukan ... bukan mengganti, tapi menunjuk, Yang Mulia, inilah perbedaan yang paling mendasar antara pejabat definitif dengan pejabat bukan definitif.

Nah, itu dalam norma ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2010 mengatur bahwa gubernur atau wakil, bupati atau wali bupati, wali kota, dilarang melakukan penggantian pejabat, penggantian, Yang Mulia, ini bukan penggantian yang terjadi, penunjukan, 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dalam hal ini terjadi kekosongan jabatan, maka gubernur, bupati, dan wali kota menunjuk pejabat pelaksana tugas. Dan yang dimaksud dengan penggantian adalah hanya dibatasi ... hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan, Yang Mulia. Ini bukan mutasi yang terjadi.

488. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

489. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Nah, ini (...)

490. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau begitu ini dalil ini ditolak Saudara, kan?

491. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia.

492. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus Petitumnya sekarang.

493. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kedudukan hukum mengadili perkara ini.
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini.
- Menyatakan perkara ini kabur.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

494. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

495. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/94204/KPU-Kab tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara, anggap dibacakan.
- Menyatakan benar perolehan suara yang ditetapkan Termohon, anggap dibacakan.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56, anggap dibacakan.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 58, anggap dibacakan.

Terima kasih, Yang Mulia.

496. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Prof. Saldi, ada? Cukup. Yang Mulia? Cukup.

Sekarang Bawaslu. Bawaslu disampaikan ... Anda juga menyampaikan resume, tapi tolong dibacakan hanya tadi, ya, yang berkenaan apakah proses pencalonan itu sudah klir atau belum? Terus, masalah yang berkaitan dengan ... apa ... pergeseran atau mutasi PNS juga sudah klir atau belum? Tidak perlu dibacakan seluruhnya, silakan! Proses-prosesnya, ada sequence waktunya, dan sebagainya itu dianggap telah dibacakan, ya.

497. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Terima kasih, Yang Mulia.

498. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda menyampaikan ini ada sequence waktunya. Ya, silakan!

499. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Terima kasih, Yang Mulia, yang memberikan waktu kepada kami. Saya perlu membacakan ada 3 Pokok Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021.

Satu. Adalah Pokok Permohonan yang pada pokoknya mendalilkan mengikutsertakan Calon Wakil Bupati Petahana Nomor Urut 1 yang sampai pada batas waktu terakhir tidak memenuhi syarat calon dan tidak ... tindakan Termohon yang tidak membatalkan pencalonan adalah melanggar hukum pemilihan tentang pemenuhan persyaratan calon.

500. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Intinya gimana, menurut Bawaslu?

501. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Menurut Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah melaksanakan pengawasan terhadap proses pencalonan dan pendaftaran Drs. Alfons Sesa, M.M.

502. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

503. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Bakal calon wakil bupati (...)

504. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu enggak usah dibacakan. Jadi kita itu yang bahas, apakah Saudara Alfons Sesa itu memenuhi syarat? Artinya, sudah mengundurkan diri atau sudah tidak berstatus sebagai PNS? Gimana? Kalau sequance waktunya enggak usah dibacakan, intinya saja.

505. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Ya. Baik, Yang Mulia. Bahwa sesuai proses yang tadi disampaikan oleh Termohon itu, itu telah diawasi oleh Bawaslu. Dan proses untuk mendapatkan SK, itu ... SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang, pada saat kita melakukan ... kami mengawasi KPU melakukan klarifikasi di BKD Provinsi Papua, hanya kami menemukan dokumen-dokumen yang tadi telah dibacakan oleh (...)

506. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Termohon?

507. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Termohon.

508. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

509. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Untuk SK, itu kami Bawaslu tidak mendapatkan di tanggal 18 dan 19 di Jayapura.

510. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus!

511. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Dan perti (...)

512. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau ... sebentar! Kalau menurut Bawaslu, apakah proses menyatakan pengunduran diri itu sudah bisa dijadikan syarat untuk pencalonan?

513. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Yang kami mengikuti dalam proses ini adalah dari proses tadi, terkait dengan surat pengunduran dan lain sebagainya. Itu menurut yang ada pada kami Bawaslu yang dalam proses pengawasan. Jadi (...)

514. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi di dalam pengawasan itu, setelah dia ditetapkan sebagai calon, proses itu tadi sudah bisa dipakai untuk pencalonan?

515. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Itu bisa dipakai.

516. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bisa dipakai?

517. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Ya, bisa dipakai.

518. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena itu adalah suatu proses?

519. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Ya adalah suatu proses.

520. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sehingga sudah memenuhi syarat sebagai penca ... untuk pencalonan?

521. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Ya.

522. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus kesimpulannya, gimana? Apakah betul yang didalilkan bahwa itu tindakan Termohon tidak membatalkan calon itu melanggar hukum pemilihan atau tidak?

523. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Ya, nanti dijawab oleh Nazil.

524. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

525. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Izin, Yang Mulia. Terkait terhadap SK pemberhentian ini, setelah Bawaslu kabupaten berkoordinasi kepada kami di provinsi dan kami berkoordinasi lanjutan ke Bawaslu Republik Indonesia, ditemukan data bahwa dok ... ini merupakan serangkaian kegiatan bahwa untuk proses mendapatkan SK yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Untuk golongan pembina utama madya, atau widyaiswara utama, atau ahli utama Golongan IV/D, itu ditandatangani oleh presiden.

526. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

527. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Nah, pada saat pencalonan, Saudara Alfons Sesa ini diberi kesempatan 30 hari, yakni batas akhir melengkapi berkas tersebut adalah tanggal 9 November, 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Nah, ketika tanggal 9 November ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan belum memberikan ... apa namanya ... keputusan dari pejabat berwenang, tetapi surat dari Badan Kepegawaian Negara telah terbit tertanggal 9 November.

528. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini begini, ya. Saya bacakan, ya?

529. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Ya.

530. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada peraturan atau perkara, ya. Undang-Undang Pasal 7 huruf s, ya, huruf s. Kemudian, dilanjutkan dengan huruf t, ya. Ini huruf t-nya, "Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota TNI, kepolisian negara, dan pegawai negeri sipil, atau kepala desa sebutan lainnya yang ditetapkan sebagai pasangan calon." Jadi tidak perlu mendapat SK, tapi menyatakan pengunduran diri saja itu sudah bisa dipakai sebagai persyaratan pencalonan, gitu, lho, ya?

531. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Jadi, Yang Mulia, ketika penetapan calon, memang betul KPU berpatokan kepada surat pengunduran diri (...)

532. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu, kan? Ya, sudah klir berarti.

533. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Untuk melengkapi ... untuk melengkapi, diberi kesempatan 30 hari.

534. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Akhirnya (...)

535. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Akhirnya (...)

536. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Surat menyatakan pengundurkan diri itu baru muncul, tadi dikatakan, memerlukan proses karena yang bersangkutan itu pangkatnya Golongan IV/D Pembina Utama Madya, maka itu memerlukan SK presiden.

537. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Betul, Yang Mulia.

538. KETUA: ARIEF HIDAYAT

SK presiden itu membutuhkan proses yang lama.

539. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Betul, Yang Mulia.

540. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sehingga oleh peraturan pilkada, diakomodasikan menyatakan mengundurkan diri saja sudah bisa dipakai, gitu lho.

541. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Ya, Yang Mulia.

542. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang jelas, ya.

543. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Namun waktu tanggal 9 November, ini kejadian tanggal 9 November, Yang Mulia, batas akhir harus mengumpulkan surat dari pejabat yang berwenang. Ketika tanggal 9 November, Bawaslu baru menerima surat hasil klarifikasi di BKN Jayapura (...)

544. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu prosesnya?

545. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Ya, surat pertimbangan teknis (...)

546. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang saya tanyakan. Pihak Terkait, surat pernyataan mengundurkan diri itu, kapan? Tahu, enggak?

547. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

3 Maret, Yang Mulia, kalau di Bawaslu.

548. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bawaslu 3 Maret?

549. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Ya.

550. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah selesai. Sekarang yang berikutnya, Bawaslu.

551. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Oke.

552. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dalam rangka mutasi pejabat itu yang mengangkat plt sekwan, bagaimana?

553. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Pergantian. Di sini pergantian pejabat sudah dilaporkan kepada Bawaslu, kejadiannya per tanggal 3 September. Pergantian pejabatnya dilaporkan ke Bawaslu itu tanggal 10.

554. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

555. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Berdasarkan peraturan Bawaslu, maka itu dianggap kedaluwarsa. Namun, itu adalah laporan dijadikan sebagai temuan awal oleh Bawaslu untuk melakukan tindakan lanjut. Sehingga, Bawaslu mengeluarkan ... dibuat dalam temuan Bawaslu dan dilakukan klarifikasi kepada para pihak, bupati, dalam hal ini Samsudin Anggiluli (...)

556. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang yang saya tanya, sekarang itu prosesnya (...)

557. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Ya.

558. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sequance-nya, tahapnya waktu ada laporan, sampai kepada putusan Bawaslu. Nah, sekarang menurut putusan Bawaslu, apakah mutasi, kemudian mengangkat plt, itu pelanggaran atau bukan?

559. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Itu dalam surat kita itu ada temuan pelanggaran administrasi yang disampaikan kepada KPU Sorong Selatan untuk ditindaklanjuti.

560. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk ditindaklanjuti?

561. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Oleh KPU Sorong Selatan.

562. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oleh KPU. Ada rekomendasi itu? Berarti menurut Bawaslu, mutasi yang dilakukan oleh bupati yang juga dia mencalonkan untuk menjadi bupati kembali, proses atau mutasi itu merupakan pelanggaran, begitu rekomendasinya, ya? Bagaimana, KPU ... Bawaslu, tadi? Betul itu pelanggaran?

563. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Ya.

564. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pelanggaran?

565. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Itu ada pelanggaran administrasi.

566. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pelanggaran administrasi.

567. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Yang kami sampaikan kepada KPU (...)

568. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang perlu ditindaklanjuti oleh KPU. Lah, KPU menindaklanjuti, enggak? Bagaimana, KPU, sekarang? Menindaklanjuti, enggak?

569. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Yang Mulia.

570. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

571. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Jadi, yang didapatkan oleh KPU dari Bawaslu itu adalah penerusan dugaan pelanggaran administrasi (...)

572. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu rekomendasinya kan untuk ditindaklanjuti, kan?

573. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya. Jadi, di dalam surat itu juga tidak spesifik menyatakan rekomendasi, hanya penerusan laporan.

574. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Penerusan laporan?

575. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya, dan atas dasar itu yang tadi kami jelaskan bahwa KPU melakukan koordinasi dengan KPU provinsi.

576. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

577. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Dan KPU memberikan petunjuk untuk membentuk tim klarifikasi.

578. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus!

579. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Dan kemudian, KPU di bawah pengawasan Bawaslu melakukan klarifikasi kepada pejabat terkait kepada bupati dan kepada BKN regional.

580. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

581. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Dan petunjuk dari BKN regional bahwa plt sekretaris itu bukan kategori pejabat. Demikian, Yang Mulia.

582. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya, cukup. Berarti intinya menurut Bawaslu, itu akhirnya sudah dilakukan tindak lanjut, ya? Dan itu bukan pelanggaran berarti, betul, Bawaslu? Bagaimana, Bawaslu, yang tegas itu! Ini pelanggaran atau bukan setelah dilakukan klarifikasi dan sebagainya?

583. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Ya, setelah dilakukan klarifikasi, seterusnya itu tidak dapat diregister bahwa berkas itu tidak memenuhi syarat.

584. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, berarti tidak memenuhi syarat, akhirnya laporan itu tidak dapat diregister dan ditindaklanjuti, gitu, kan?

585. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Ya.

586. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus yang terakhir, penggunaan dana itu?

587. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Ya, untuk penggunaan dana prospek dalam proses penanganan di Bawaslu sudah dilakukan proses penanganan dan tidak ditemukan dugaan yang dilakukan oleh petahana.

588. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

589. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Dalam hal ini perintah atau surat bukti dari bupati yang bersangkutan, sehingga itu tidak diregister.

590. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Berarti tidak ditindaklanjuti?

591. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Ya.

592. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terima kasih. Kalau begitu, ada lagi yang akan disampaikan? Cukup, ya?

593. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Cukup.

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Prof. Saldi? Cukup. Yang Mulia? Cukup. Baik, kalau begitu Perkara 31/PHP.BUP-XIX/2021 sudah selesai. Sekarang Perkara 36/PHP.BUP-XIX/2021.

595. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: CHRISTOFFEL TUTUARIMA

Izin, Yang Mulia.

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari mana?

597. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: CHRISTOFFEL TUTUARIMA

Dari Pemohon, Yang Mulia.

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa Pemohon? Pemohon itu sudah tidak punya hak untuk menyampaikan.

599. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: CHRISTOFFEL TUTUARIMA

Kita ingin (...)

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa?

601. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: CHRISTOFFEL TUTUARIMA

Menyampaikan perbaikan surat saja.

602. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perbaikan surat apa?

603. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: CHRISTOFFEL TUTUARIMA

Perbaikan surat P-55.

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

605. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: CHRISTOFFEL TUTUARIMA

Surat P-55 ... bukti surat (...)

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Begini (...)

607. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: CHRISTOFFEL TUTUARIMA

P-55.

608. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Begini (...)

609. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: CHRISTOFFEL TUTUARIMA

Ya.

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu bukti atau apa itu?

611. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: CHRISTOFFEL TUTUARIMA

Bukti surat.

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, bukti surat kemarin kan saya sudah mengatakan, "Bukti yang diajukan oleh Pemohon paling lambat diserahkan pada waktu persidangan awal sebelum sidang ditutup."

613. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: CHRISTOFFEL TUTUARIMA

Baik.

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan?

615. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: CHRISTOFFEL TUTUARIMA

Ya.

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Setelah itu, sudah tidak ada bukti tambahan lagi. Kalau perkaranya ini diteruskan ada pemeriksaan ahli atau saksi, maka masih boleh menambahkan bukti.

617. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: CHRISTOFFEL TUTUARIMA

Baik.

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi ini, kan belum ada surat lanjut. Nanti kalau perkara Anda dilanjutkan, silakan itu diajukan.

619. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: CHRISTOFFEL TUTUARIMA

Baik. Terima kasih.

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Tapi kalau nanti putusannya tidak lanjut, ya, itu sudah selesai (...)

621. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: CHRISTOFFEL TUTUARIMA

Ya.

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Makanya saya mau menutup persidangan ini, yang pertama saya mengatakan pada awal, "Apakah ada bukti tambahan atau tidak?"

623. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: CHRISTOFFEL TUTUARIMA

Ya.

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kan Anda enggak menyampaikan, kan? Lah, kalau baru menyampaikan sekarang bukti, itu tidak adil terhadap mereka.

625. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: CHRISTOFFEL TUTUARIMA

Baik, terima kasih.

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Begitu. Ya, toh?

627. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: CHRISTOFFEL TUTUARIMA

Ya.

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu jelas, di dalam PMK kita jelas.

629. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: CHRISTOFFEL TUTUARIMA

Terima kasih, Yang Mulia.

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021. Tadi KPU yang mau merenvoi, itu renvoi yang mana? Sekarang urutannya itu. Tadi belum-belum minta renvoi saja.

631. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Renvoi di halaman 26, Yang Mulia.

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 26?

633. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

26, poin C dan poin D.

634. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: CHRISTOFFEL TUTUARIMA

Yang Mulia.

635. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari mana ini?

636. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021: CHRISTOFFEL TUTUARIMA

Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021, kami belum menerima berkasnya.

637. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda enggak berkepentingan dengan Perkara 36/PHP.BUP-XIX/2021 Anda kan perkaranya 31/PHP.BUP-XIX/2021. Yang berkepentingan sana Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021. Ya, kan? Anda ngapain ngurusin Perkara 36/PHP.BUP-XIX/2021? Wong Anda itu Perkaranya 31/PHP.BUP-XIX/2021! Ya, tolong ini anulah, coba Anda belajar mengenai hukum acaranya yang jelas, ya! Bisa menjadi Kuasa Hukum itu harus paham Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Pemilunya, PMK-nya, Anda juga harus paham PKPU-nya, Bawaslu punya kewenangan apa, dan sebagainya. Ini pertanyaan ini menandakan bahwa kita tidak belajar banyak, ya. Sambil belajar kita ini di sini, ya? Tidak berarti Hakimnya itu sempurna, juga tidak, tapi kita belajar terus, ya. Anda kalau minta berkas Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021, ya, nanti kalau sudah selesai Anda hubungi sana, "Minta boleh enggak," gitu.

Ya, baik. Renvoinya halaman 26.

638. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

26, poin C, Yang Mulia.

639. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Poin C?

640. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Di situ tertulis *BB-1*, seharusnya *BB-3*. Kemudian (...)

641. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Poin berapa?

642. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Poin ... poin 72 huruf C.

643. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Huruf C. BB-1?

644. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Mestinya BB-3.

645. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, *1*-nya sebetulnya 3?

646. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya, Yang Mulia.

647. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus?

648. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Terus di poin D tertulis *4 September*, seharusnya 14 September.

649. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

650. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Itu saja, Yang Mulia.

651. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Poin D, *4 September*, yang betul 14 September 2020, gitu, ya?

652. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya, Yang Mulia.

653. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Anda mengajukan Eksepsi?

654. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya, betul, Yang Mulia. Ada Eksepsi tentang kewenangan (...)

655. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu enggak usah dibacakan, halaman 34 dan seterusnya itu, ya.

656. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Siap.

657. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang yang kedua.

658. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Eksepsi tentang Legal Standing tidak memenuhi syarat (...)

659. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Legal Standing. Itu tidak memenuhi Pasal 158?

660. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Betul, Yang Mulia.

661. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Persentasenya berapa sih sebetulnya?

662. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Persentasenya ini kalau Pemohon Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021 ini lebih 20%.

663. KETUA: ARIEF HIDAYAT

20%, padahal seharusnya hanya berapa?

664. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

2%.

665. KETUA: ARIEF HIDAYAT

2%. Baik, terus sekarang yang berikutnya.

666. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kemudian ada juga (...)

667. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 10.

668. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Halaman 10 tentang Eksepsi kabur.

669. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukan Termohon kabur, kan ini?

670. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Enggak. Dalil Pemohon kabur karena tidak menguraikan (...)

671. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

672. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Bentuk pelanggaran yang konkret di TPS.

673. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, obscur, ya?

674. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Obscur.

675. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang Pokok Permohonan. Apa yang Anda respons?

676. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Pokok Permohonan ini, Yang Mulia, mohon izin. Tadi yang menyangkut Calon Wakil Bupati Alfons Sesa, tadi kami sudah jelaskan di Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021.

677. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sama dengan Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021?

678. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Sama.

679. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini dianggap dibacakan, ya.

680. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Dianggap dibacakan.

681. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bahwa proses pencalonan sudah selesai?

682. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Sudah selesai.

683. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus, yang kedua?

684. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kami mungkin hanya menjelaskan sedikit tentang dr. Alex ... eh, dr. Feliks Duwit (Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 3).

685. KETUA: ARIEF HIDAYAT

dr. Feliks Duwit?

686. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

687. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa dr. Feliks Duwit?

688. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Menurut Pemohon, dr. Feliks Duwit tidak memenuhi syarat. Padahal, dr. Feliks Duwit itu pada saat perbaikan persyaratan calon sudah memenuhi syarat, sudah ada pemberhentian dari ... surat pemberhentian dari Bupati Sorong Selatan.

689. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, oke. Kalau Pak Alfons itu, kan ... anu ... kan wakil bupati, kan? Calon, toh?

690. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Calon wakil bupati (...)

691. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau Pak Feliks?

692. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kalau dr. Feliks, pasangan nomor urut (...)

693. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lain, kan?

694. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 3.

695. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi juga dipersoalkan?

696. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Dipersoalkan oleh Pemohon Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021

697. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon? Ya. Terus, jawaban Anda?

698. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kalau jawaban kami pada saat perbaikan, dr. Feliks sudah memenuhi syarat.

699. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah memenuh syarat.

700. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya. Sudah ada surat persetujuan pengunduran diri dari Bupati Sorong Selatan.

701. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus?

702. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Itu saja, Yang Mulia.

Kemudian, mengenai dalil-dalil mengenai pelanggaran di TPS. Yang perlu kami pertegas di situ hanya soal pemungutan suara ulang yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan peraturan.

703. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu pemungutan suara ulang, itu di?

704. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan.

705. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, itu di mana itu tempatnya itu?

706. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Di Kampung Adona.

707. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kampung?

708. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Halaman 38, Distrik Kokoda Utara, TPS 1 Kampung Adona.

709. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman berapa?

710. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Halaman 38.

711. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 38. Halaman 38. Distrik Kokoda Utara?

712. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kokoda Utara.

713. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kokoda Utara, Kampung Adona, TPS 1?

714. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Betul, Yang Mulia.

715. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu dilakukan PSU?

716. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Dilakukan PSU atas rekomendasi Bawaslu.

717. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Rekomendasi. Kenapa dilakukan PSU?

718. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Jadi setelah dilakukan penelitian, ternyata pencoblosan dilakukan sebelum waktunya.

719. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, kenapa waktunya mestinya ... harusnya kapan?

720. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Tanggal 9.

721. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tanggal 9, pukul 07.00 WIT, kan mulainya?

722. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya, betul kalau menurut (...)

723. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sampai pukul 13.00 WIT?

724. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

725. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ini sebelumnya itu kapan itu?

726. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Tanggal 8 Desember.

727. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha? 8 Desember, jam berapa?

728. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Di ... sudah dicoblos tanggal 8 Desember. Jadi, direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

729. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ini di tempat ini, TPS 1 itu berapa DPT-nya? Ada bukti?

730. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Sebentar, Yang Mulia.

731. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mestinya bisa dibuka itu cepat! Jadi, Kuasa Hukum yang merespons, KPU-nya yang menyiapkan bahan. Itu kerja samanya harus begitu. Kayak Hakim ini, Hakim ini menanyakan begini, begini. Di belakang itu ada teman-teman yang menyiapkan bahan kalau dibutuhkan Hakim. Gitu, lho. Yang manis, gitu, kerja samanya. Kenapa kok kita memperbolehkan yang hadir itu di sini 2 orang? Itu karena semacam itu.

Berapa TPS 001 Kampung Adona?

732. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Cuma 1, Yang Mulia.

733. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, dalam DPT yang mempunyai hak pilih, itu berapa? Ya, kalau TPS 1 Kampung Adona, ya, cuma 1. Kalau Kampung Adona, TPS-nya bisa 1, 2, 3.

734. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

DPT=365, Yang Mulia.

735. KETUA: ARIEF HIDAYAT

365?

736. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

737. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu tanggal 8 sudah dilakukan pencoblosan?

738. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Betul, Yang Mulia.

739. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul. Terus akhirnya diketahui oleh Bawaslu, Bawaslu merekomendasikan untuk dilakukan PSU?

740. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Berdasarkan temuan pengawas TPS?

741. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus akhirnya pada tanggal 9 dilakukan PSU? Atau kapan PSU dilaksanakan? Lho, KPU jangan nengok ke Bawaslu! Anda melaksanakan kapan ini PSU-nya?

742. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Tanggal 14 Desember kalau tidak salah, Yang Mulia. Karena rekomendasi itu dikeluarkan tanggal 11.

743. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, akhirnya PSU tanggal 14 Desember?

744. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

745. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hasilnya, gimana hasilnya?

746. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Hasilnya 100% untuk Pasangan Nomor Urut 1.

747. KETUA: ARIEF HIDAYAT

100% untuk Pasangan Nomor Urut 1?

748. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

749. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, sekarang semua saksi pasangan di situ tanda tangan, enggak? Menyetujui atau tidak? Menandatangani atau tidak? Ya, coba dijelaskan!

750. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Izin, Yang Mulia.

751. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

752. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Setelah proses pemungutan ... berdasarkan hasil temuan tadi oleh petugas pengawas TPS, kemudian rekomendasi Bawaslu Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember. Dan hasilnya, Pasangan Nomor Urut 1=100%. Dan berkaitan dengan penandatanganan Sertifikat Hasil Model C, hanya Pasangan Nomor Urut 1 saksinya yang bersedia untuk menandatangani dokumen dimaksud.

753. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang lain tidak tanda tangan?

754. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Yang lain tidak ke ... menandatangani.

755. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak tanda tangan yang lainnya? Tapi, pengawas di situ tanda tangan, enggak?

756. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Bawaslu ... pengawas ... salinannya disampaikan kepada ... kepada pengawas TPS (...)

757. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pengawas TPS?

758. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Dan disampaikan secara berjenjang kepada Bawaslu.

759. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu 100% itu, 365 itu semuanya nyoblos jadinya?

760. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Ya, dicoblos.

761. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berarti Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh=365?

762. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Ya, Yang Mulia.

763. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kok bisa 100 ... 365 itu dilakukan coblos atau apa ini?

764. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Itu dilakukan ... pada tanggal 14 itu dilakukan pemungutan suara secara terbuka dan hasilnya, Yang Mulia, seperti (...)

765. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, semuanya memang nyoblos untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 1?

766. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Ya.

767. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukan noken atau bukan ikat?

768. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Bukan noken, Yang Mulia. Itu memang murni suara (...)

769. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemungutan?

770. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Suara, dan hadir juga Bawaslu, hadir KPU, dan para pihak yang ada di TPS saat itu.

771. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Tapi tidak mau tanda tangan, ya?

772. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Ya.

773. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pasangan yang lain, ya, saksinya, ya. Terus kemudian, TPS 01 Adona ini dibawa ke tingkat kecamatan? Kecamatannya atau distriknya namanya Kokoda Utara?

774. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Distriknya ... distriknya Kokoda Utara.

775. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pada waktu rekapitulasi di tingkat Kokoda, ada persoalan, enggak, ini?

776. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Secara normatif da ... tidak ada permasalahan karena sampai selesai rekapitulasi di tingkat distrik tidak ada ... apa ... pengajuan keberatan dalam C kejadian khusus di TPS (...)

777. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada?

778. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Atau pun rekomendasi di panwaslu tingkat distrik. Sehingga Termohon secara normatif hasilnya disampaikan secara berjenjang sampai pada pleno di tingkat kabupaten.

779. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di tingkat kabupaten. Baik, cukup, ya. Ada lagi yang akan disampaikan?

780. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Pass, Yang Mulia.

781. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah, ya?

782. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Ya.

783. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kuasa Hukum, gimana?

784. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Cukup, Yang Mulia. Kami langsung pada Petitem.

785. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

786. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka perkenankan kami memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021 agar berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut.

Menerima Eksepsi Termohon. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92 dan seterusnya ... dianggap dibacakan. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun dua ribu ... 2020 yang benar adalah sebagaiba ... sebagaimana tercantum dalam tabel.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum. Demikian, Yang Mulia.

787. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Prof. Saldi, cukup, ya? Yang Mulia, cukup, ya?

Sekarang Pihak Terkait yang singkat, ya, Termohon-nya saja singkat, masa Pihak Terkait mau panjang-panjang ngapain. Ada Eksepsi?

788. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Ada, Yang Mulia.

789. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tentang apa?

790. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Ada 3 hal, Yang Mulia. Yang pertama, terkait dengan ketidakwenangan Mahkamah untuk mengadili perkara ini, Yang Mulia (...)

791. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan. Tidak berwenang, ya.

792. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Lalu kemudian, terkait dengan legal standing atau kedudukan hukum Pemohon karena tidak memenuhi Pasal 158, Yang Mulia (...)

793. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak punya legal standing?

794. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Ya.

795. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus yang ketiga?

796. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Lalu kemudian, ada Permohonan Pemohon yang tidak jelas, Yang Mulia.

797. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

798. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Karena mereka meminta untuk langsung menolak suara dari Pihak Terkait (...)

799. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pihak Terkait.

800. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Tidak jelas dalilnya, Yang Mulia.

801. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus, dalam Pokok Permohonan?

802. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia, kami hanya menjawab yang terkait dengan Drs. Alfons Sesa, Yang Mulia.

803. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

804. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Sebagaimana sudah tadi juga dijelaskan oleh Kuasa Hukum dalam Pihak Terkait di Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia, kami mendukung dan mengacu pada Pasal 7 ayat (2) (...)

805. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sama, ya. Jadi, yang dijelaskan oleh Termohon (...)

806. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Ya, betul, Yang Mulia.

807. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dalam Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 (...)

808. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Betul.

809. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan apa yang disampaikan Bawaslu sudah selesai, ya?

810. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Ya. Karena kami juga selain sudah mengajukan surat pengunduran diri tetanggal 3 Maret dan juga sudah kembali diperkuat oleh surat-surat dari Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Kepegawaian Nasional, termasuk juga ada surat keputusan presiden, Yang Mulia.

811. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

812. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Pemohon juga di tanggal 14 September pada saat diundang oleh Bawaslu untuk melakukan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon, Pemohon sendiri juga kemudian tidak melakukan keberatan, Yang Mulia.

813. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tanggal berapa itu ... tanggal berapa itu?

814. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Tanggal 14 September 2020, Yang Mulia.

815. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tanggal 14 September. Jadi, Pemohon Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021 sudah enggak mempersoalkan, kan, ya?

816. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Ya, Yang Mulia.

817. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

818. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Tidak ada keberatan di dalam (...)

819. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari semua pasangan calon?

820. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Ya, Yang Mulia.

821. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus?

822. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Oleh sebab itu ... bahkan berdasarkan keputusan presiden sudah dinyatakan tertanggal 1 November 2020, yang bersangkutan bukan lagi kemudian sebagai aparatur sipil negara.

823. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau itu, kan, yang terakhir-terakhir itu, ya.

824. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Ya, Yang Mulia.

825. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

826. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Jadi, sejak dari tanggal 3 Maret kami sudah menyatakan surat pengunduran diri dan dipertegas kembali dengan surat yang kami tanda tangani di dalam Formulir BB3-KWK yang menyatakan sudah berhenti, Yang Mulia.

827. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

828. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Baik. Lalu, berikutnya yang terakhir, Yang Mulia, terkait dengan perihal pelanggaran dalam pemungutan suara dan/atau perhitungan suara, Yang Mulia. Kami melihat di situ tidak ada sengketa hasil yang dimohonkan oleh Pemohon. Pemohon tidak menjelaskan apa hubungan Pihak Terkait, dalam hal ini Paslon Nomor Urut 01, dengan ketertinggalan suara yang mereka alami di TPS-TPS tersebut, Yang Mulia.

829. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik ... baik.

830. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Kurang lebih seperti itu.

831. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi, menurut Saudara (...)

832. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Ya, Yang Mulia.

833. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu apa yang dilakukan ada PSU di TPS 1 di Adona itu, betul? Ada PSU? Benar? Anda tahu juga?

834. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Ya, Yang Mulia.

835. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tahu, ya. Itu, kan, semua suara untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 01, kan?

836. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Ya. Tetapi di dalam Permohonan tidak ... tidak di (...)

837. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi Anda saya tanya, tahu ada ... kalau ada PSU itu tahu?

838. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Kami mendengar bahwa ada PSU, Yang Mulia.

839. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Lah, itu, Anda itu pasangan nomor urut berapa, Pihak Terkait?

840. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Pasangan Nomor Urut 01, Yang Mulia.

841. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nomor 01. Tapi Anda dapat di situ 100% tahu, kan, mestinya?

842. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Tahu, Yang Mulia.

843. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya, baik. Prof. ada?

844. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Kurang lebih itu, Yang Mulia. Saya lanjutkan dengan (...)

845. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang Petitumnya.

846. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Baik, Yang Mulia.

Dalam eksepsi. Yang pertama, mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan ini. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur atau obscur libel. Menyatakan pernyataan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Sorong Selatan Nomor 92 selanjutnya dianggap telah dibacakan.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan berdasarkan nomor ... Keputusan KPU Nomor 92.
4. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Sorong Selatan Nomor 56 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon.
5. Yang terakhir. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 58 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

847. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Cukup, ya?
Sekarang Bawaslu. Bawaslu saya kira yang perlu direspons kayak yang lain-lain kan sudah sama, kan ya?

848. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Baik.

849. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang lain masalah pencalonan, masalah mutasi itu sudah beres. Sekarang yang baru adalah Anda punya rekomendasi untuk dilakukan PSU di satu TPS?

850. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Baik.

851. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gimana itu?

852. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Yang Mulia, secara umum kalau kita lihat ada 30 ... 13 pokok dalil. Saya pikir untuk SK saya ulas kembali sedikit.

Yang pertama, bahwa Saudara Alfons Sesa telah mundur pada tanggal 3 Maret 2020. Yang Kedua, keluar Pertek (Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara) tanggal 9 November untuk menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berhenti terhitung mulai tanggal 1 November 2020.

Pada tanggal 1 Desember 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 44K Tahun 2020 dan seterusnya (...)

853. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu kita sudah tahu semua (...)

854. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Oke.

855. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan sudah terbuka di dalam persidangan ini (...)

856. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Baik. Saya lanjutkan (...)

857. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Disertai dengan buktinya.

858. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Ya.

859. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mangkanya saya bilang, yang baru itu berkenaan dengan PSU itu, apa betul ada rekomendasi yang kemudian ditindaklanjuti? Kenapa ada rekomendasi karena pada tanggal 8 sudah dilakukan pencoblosan, itu gimana, itu?

860. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Baik. Yang Mulia, khusus untuk PSU di Kampung Adona, Distrik Kokoda Utara, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menjelaskan sebagai berikut.

Bahwa pada tanggal yang sesuai fakta laporan kami. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, pukul 08.17 WIT di TPS 01 terjadi musyawarah masyarakat, memutuskan untuk memberikan dukungan 100% kepada salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1, yakni atas nama Samsudi Anggiluli, S.E., dan Drs. Alfons Sesa pada pemilihan bupati dan wakil bupati.

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, pukul 08.30 WIT datang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Yance Salambauw, S.H., M.H., dan dr. Feliks Duwit, M.Sc., M.P.H, S.P., membawa surat manda ... mandat ke TPS 1, namun ditolak oleh petugas KPPS karena yang bersangkutan terlambat datang. Pada saat itu, Ketua Panwas Distrik Kokoda Utara memberikan masukan kepada panwas ... kepada KPPS untuk memberikan kesempatan untuk tetap menyerahkan surat mandat kepada KPPS agar saksi tersebut boleh mengikuti proses pencoblosan di tanggal ... di TPS 1 Kampung Adona.

Pada pukul 09.35 WIT terjadi perdebatan dan tarik-menarik antara kedua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan

Nomor Urut 3, meminta kepada KPPS untuk memberikan 50 surat suara saja kepada saksi Pasangan Nomor Urut 3, namun tidak diterima oleh KPPS dan juga saksi Nomor Urut Pasangan Calon 1.

Pada jam 13.15 WIT, KPPS memutuskan untuk menghentikan proses jalannya pencoblosan sampai dengan besok tanggal 10 Desember 2020 di TPS 01 Kampung Adona, Distrik Kokoda Utara.

Pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 10.39 WIT, anggota KPPS telah melaksanakan pencoblosan terhadap 365 surat suara sendiri di TPS 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara. Bahwa terhadap tindakan anggota KPPS yang melakukan pencoblosan sendiri terhadap 365 surat suara di TPS 01 Kampung Adona, Distrik Kokoda Utara, menjadi temuan hasil pengawasan Panwas Distrik Kokoda Utara mengenai dugaan terjadi pelanggaran administrasi pemungutan suara yang kemudian diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan.

Setelah Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan klarifikasi dan kajian, maka disimpulkan telah memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemungutan suara.

Bahwa berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan terhadap Temuan Nomor 3/TM dan seterusnya, terungkap fakta bahwa pada tanggal 10 Desember, pukul 10.39 WIT anggota KPPS TPS 01 Kampung Adona melakukan pencoblosan sendiri terhadap 365 surat suara tanpa dihadiri oleh pemilih TPS 01 Kampung Adona.

Bahwa pada tanggal 10 Desember, Panwaslu Distrik Kokoda Utara melakukan supervisi dan pengawasan di Kampung Adona dan menemukan adanya anggota TPS mencoblos 365 surat suara.

Bahwa berdasarkan temuan tersebut, Panwaslu Distrik Kokoda Utara berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, terhadap temuan tersebut, kabupaten melakukan klarifikasi dan ... selatan ... ter ... kepada atas nama Carlos Dorowe, Ketua Panwaslu Kokoda Utara. Dan akhirnya, direkomendasikan sesuai dengan Surat Nomor 100/PB.09/Ketua dan seterusnya, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kampung Adona, Distrik Kokoda Utara, sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan oleh undang-undang 4 hari setelah hari pemungutan suara.

Bahwa KPU Kabupaten Sorong Selatan melaksanakan pemungutan suara ulang di Kampung Adona, Distrik Kokoda Utara, pada tanggal 13 Desember 2020 sebagai tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan dengan hasil PSU sebagai berikut.

Bukti PK-37. Nomor Urut 1.

861. KETUA: ARIEF HIDAYAT

PK berapa? 37?

862. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Bukti PK-37.

863. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

864. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Nomor Urut 1 atas nama Pihak Terkait (...)

865. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya enggak usah, disebutkan saja Nomor Urut 1 (...)

866. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Ya, jumlah perolehan suara=342.

867. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

868. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Atas nama Nomor Urut 2, Yunus Saflembolo, S.E., MTP. dan Alexander, S.E. Dedaida, S.P. jumlah perolehan suara=2.

Nomor Urut 3, Yance Salembauw, S.H., M.H. dan dr. Feliks Duwit, M.Sc., M.Ph., SP.Pd. jumlah perolehan suara=14.

Sementara Nomor Urut 4 atas nama Pieter Kondjol, S.E., M.A. dan Madun p ... Narwanwan jumlah perolehan suara PSU=2.

Jumlah suara sah=360, jumlah surat suara tidak sah=4, dan jumlah suara sah tambah tidak sah=364, sebagaimana tercantum dalam bukti kami di Bukti PK-37.

Mengenai dalil Pemohon tentang beberapa TPS yang terjadi pelanggaran, Yang Mulia. Khusus untuk pelanggaran yang didalilkan di TPS 01 Kelurahan Pohoj, TPS 01 Kampung Keyen, TPS 02 Kampung Keyen, TPS 03 Kampung Keyen, TPS 01 Kampung Wernas ini persoalannya mengenai surat pemberitahuan yang belum terdistribusikan.

869. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em, oke.

870. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Namun kemudian oleh PTPS kami dan jajaran korwil distrik masing-masing menyarakan kepada ketua KPPS bahwa nama-nama yang belum ... terhadap nama-nama atau orang tertentu yang belum mendapatkan undangan boleh mencocokkan e-KTP nya dengan DPT.

871. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu sesuai ketentuan kan enggak pake C-6 kan masih bisa nyoblos.

872. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Boleh dicek, ya.

873. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

874. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Itu langsung diikuti oleh KPT setempat.

875. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

876. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Selanjutnya untuk dalil Pemohon di TPS 01 kampung (...)

877. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya kira yang lain dianggap dibacakan, ya.

878. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Baik.

879. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang penting saya mengatakan begini, kok ada perbedaan antara Termohon dan Pemohon ini? Tadi dilakukan PSU, PSU tuh jadinya tanggal berapa kalau menurut Bawaslu?

880. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Kalau menurut Bawaslu (...)

881. KETUA: ARIEF HIDAYAT

14?

882. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

13 Desember sesuai surat KPU (...)

883. KETUA: ARIEF HIDAYAT

14 Desember, ya?

884. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Dan kami mengawasi.

885. KETUA: ARIEF HIDAYAT

14 Desember?

886. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

13, Yang Mulia.

887. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh. Tadi katanya tanggal 14.

888. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

13 Desember, Yang Mulia.

889. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gimana ini yang benar ini? Anda punya buktinya juga, ya?

890. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Ada, Yang Mulia. Surat KPU dan (...)

891. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi menurut Termohon kok 14? Yang benar mana ini? Termohon? Termohon?

892. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Ya. Izin, Yang Mulia. Mohon maaf.

893. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

894. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Terkait ... apa? Kami tidak menghafal tanggalnya yang baik, sebenarnya harus tanggal 13.

895. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang betul 13?

896. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Yang betul 13.

897. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi perolehan suaranya katanya 100% untuk Pasangan Nomor Urut 1, yang benar gimana?

898. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Izin, Yang Mulia. Itu maksudnya yang awal proses pertama. Saat hasil (...)

899. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, akhirnya yang dipakai kan yang tanggal 13 itu.

900. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Ya.

901. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tanggal 13 itu coba itu ada buktinya di situ?

902. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Ada, ada, ada, Yang Mulia.

903. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gimana itu perolehan suaranya dibacakan Kuasa!

904. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Saya bacakan, Yang Mulia. Perolehan suara setelah PSU. Nomor Urut 1=342.

905. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus!

906. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Nomor Urut 2=2.

907. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

908. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Nomor Urut 3=14.

909. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

910. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Nomor Urut 4=2 suara.

911. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, yang betul itu. Tadi keterangannya gimana katanya 100% 365? padahal ini ada 1 suara yang tidak anu, ya. Yang betul nanti keterangan Bawaslu, ya.

Sekarang pertanyaan saya ke Bawaslu, itu KPPS yang mencoblos surat suaranya semua itu ... itu diurus pidana pemilu enggak itu?

912. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Yang Mulia, yang ... apa namanya? Yang Mulia, khusus untuk KPPS yang telah dicegah, telah dilakukan penanganan pelanggaran, namun karena hari itu butuh kepastian cepat, teman-teman Bawaslu kabupaten/kota mengurus untuk proses PSU-nya dan ketika hari PSU, KPPS diganti oleh ... diganti seluruhnya oleh KPU.

913. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Berarti anu ya, di TPS 1 apa itu tadi?

914. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Kampung Adona.

915. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kampung Adona akhirnya petugas KPPS-nya diganti semua?

916. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Diganti seluruhnya.

917. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul itu? Betul, ya? Terus KPPS yang lama diadukan ke anu ... dilaporkan ke anu enggak? Ke Gakkumdu?

918. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Izin, Yang Mulia. Berkaitan itu adalah proses pengawasan Bawaslu, tapi tugas KPU adalah memberhentikan petugas KPPS.

919. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi diberhentikan oleh Termohon?

920. TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: NAHUM KRIMADI

Ya, diberhentikan.

921. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang Bawaslu melaporkan itu di Gakkumdu enggak itu? Itu kejahatan pemilu loh.

922. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Ya. Baik, Yang Mulia. KPPS ... karena rekomendasi Bawaslu untuk pelanggaran administrasi, maka tidak ditindaklanjuti.

923. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Berarti anu ya, sebetulnya kayak begitu harus dilaporkan ke Gakkumdu. Ini kayak gini, gini, ada sanksi, ya. Yang coblos dua kali saja ada sanksi pidananya, apalagi ini coblos semua, apalagi itu petugas KPPS, ya. Untuk pelajaran kita bersama, ini bagaimana membangun demokrasi Indonesia kalau begini dibiarkan, ya.

Prof. Saldi mungkin ada, enggak? Cukup, ya. Baik. Kalau begitu sudah, ya, Para Pihak. Bawaslu juga sudah menyampaikan, tapi kemudian sudah dilakukan PSU, sehingga administrasi pemilihannya sudah klir, tapi tinggal yang tersisa itu untuk kita bersama sebetulnya kalau perkara kayak begitu harus ditindaklanjuti Bawaslu itu, ya. Harus dilaporkan ke Gakkumdu dan itu harus diselesaikan melalui peradilan pidana. Kalau begitu nanti lain kali terjadi begitu, orang saya enggak apa-apa, paling-paling cuma diulang itu, enggak boleh begitu dong.

Baik, sebelum saya mengakhiri, saya akan mengesahkan bukti. Perkara 31/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-53?

924. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Betul, Yang Mulia.

925. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-51. Mana Pihak Terkait? Benar, pakai mik itu!

926. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, benar, Yang Mulia.

927. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Bawaslu PK-1 sampai dengan PK-28?

928. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Ya, benar.

929. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Benar?

930. BAWASLU: YULIUS YAROLLO (KAB. SORONG SELATAN)

Sudah benar.

931. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian Perkara 36/PHP.BUP-XIX/2021, Bukti T-1 sampai dengan T-66, betul?

932. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Betul, Yang Mulia.

933. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-23?

934. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Betul, Yang Mulia.

935. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bawaslu PK-1 sampai dengan PK-37?

936. BAWASLU: M. NAZIL HILMIE (KAB. SORONG SELATAN)

Benar, Yang Mulia.

937. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait dalam daftar alat bukti ada deskripsi PT-6 tertukar dengan deskripsi PT-7, nomor surat dari daftar Bukti PT-14 tidak sesuai. Ini nanti tolong diselesaikan, ya. Ada catatan Pihak Terkait Perkara 36/PHP.BUP-XIX/2021.

938. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Baik, Yang Mulia.

939. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, berkenaan dengan PT-6, PT-7, dan PT-14, ya. Ini semuanya saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Dengan catatan-catatan itu nanti diselesaikan dengan Kepaniteraan, ya. Kuasa Pihak Terkait, ya, ada persoalan PT-7, PT-14, dan PT-6.

940. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 36/PHP.BUP-XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Baik, Yang Mulia.

941. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti coba dicocokkan, disesuaikan. Baik.

Baik, Para Pihak Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu. Ini Panel sudah memeriksa semua Pihak dan akan dilaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, 9 orang yang dihadiri oleh seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi. Nanti akan diputus bagaimana kelanjutan dari perkara ini, apakah itu bisa lanjut atau bisa tidak lanjut, ya. Nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan, kalau lanjut kapan sidangnya, bagaimana sidangnya, kalau tidak lanjut berarti persidangan ini dianggap sudah selesai.

Baik, ada pertanyaan? Cukup. Baik, kalau cukup.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.52 WIB

Jakarta, 4 Februari 2021
Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

